

## APPENDICES

### 1. News 1

#### **Sindikrat Bali Nine Bisa Segera Dieksekusi**

- **Gugatan ke Jokowi Kandas**

*25 Februari 2015 0:46 WIB Category: Hukum, SmCetak ☐ A+ / A-*

JAKARTA – Gugatan gembong narkoba asal Australia Andrew Chan dan Myuran Sukumaran terhadap Presiden Joko Widodo tidak diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Dengan demikian, para penyelundup yang dikenal dengan sebutan Sindikat Bali Nine itu bisa segera dieksekusi.

Sebelumnya, para penyelundup tersebut menggugat Jokowi yang telah menolak grasi yang mereka ajukan.

“Gugatan Nomor 30/G/PTUN-JKT menggugat Presiden RI sebagai objek gugatan Keppres No 32/G Tahun 2014 tertanggal 30 Desember 2014. Menetapkan, menyatakan gugatan tidak diterima,” tandas Ketua Majelis sekaligus Ketua PTUN

Jakarta Hendro Puspito dalam sidang terbuka di Gedung PTUN Jakarta, Jakarta, Selasa(24/2

Nasib gugatan Andrew Chan juga serupa. Majelis hakim menyatakan gugatan itu tidak bisa diadili.

PTUN Jakarta pun menghukum keduanya membayar Rp 131 ribu. “Objek sengketa bukan ranah PTUN,” tambah Hendro.

Kuasa hukum keduanya, Todung Mulya Lubis langsung menyatakan keberatan. Dia akan melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan banding.

“Kami ingin menggunakan hak perlawanan kami,” kata Todung yang dipersilakan Hendro.

Selundupkan Heroin

Andrew-Myuran ditangkap di Bandara Ngurah Rai pada 2005 karena membawa 8,2 kg heroin. Keduanya dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Tinggi Denpasar, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.

Grasi keduanya juga ditolak oleh Jokowi. Kini keduanya bersiap-siap menghadapi regu tembak.

Kasus ini mendapat perhatian serius dari pemerintah. Bahkan, TNI telah menyiapkan pesawat tempur Sukhoi untuk mengawal pemindahan mereka dari LP Kerobokan ke Pulau Nusakambangan, Cilacap. (D3 – 25,61)

## 2. News 2

### **Jelang Eksekusi Duo Bali Nine, KJRI Sydney Dilempar Cat**

3 Maret 2015 12:33 WIB Category: Nasional, SmCetak Dikunjungi: kali A+ / A-



Foto: News.com

**JAKARTA, suaramerdeka.com** - Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Sydney, Australia, dilempari balon berisi cat merah oleh seseorang yang belum diketahui identitasnya pada Selasa (3/3) pagi.

Siaran pers Kementerian Luar Negeri RI pagi ini menyebutkan pukul 06.00 waktu Sydney ditemukan sejumlah balon berisi cairan yang dilemparkan oleh seseorang ke halaman depan KJRI, salah satunya pecah dan mencecerkan cairan merah.

Menurut Kementerian Luar Negeri, polisi setempat sudah datang ke KJRI Sydney dan memasang garis polisi di gerbang KJRI.

Pejabat KJRI Sydney bidang Sosial dan Budaya, Nicolas Manoppo mengatakan, “Begitu melihat ada cairan yang tercecer di depan pintu gerbang, staf kami tersebut langsung menghubungi polisi. Polisi kemudian memeriksa cairan itu dan tidak ada zat bahaya di dalamnya. Cairan berwarna merah itu hanya cat.”

Terkait insiden itu, KJRI di Sydney kembali mengingatkan seluruh staf untuk terus waspada sambil tetap melaksanakan tugas, termasuk pelayanan visa serta tugas kekonsuleran dan kemasyarakatan.

KJRI Sydney juga telah menyampaikan imbauan kepada seluruh warga negara Indonesia (WNI) di wilayah kerja New South Wales, Brisbane dan South Australia agar selalu waspada dan berhati-hati.

Insiden pelemparan balon berisi cairan merah ke KJRI di Sydney itu diduga terkait eksekusi dua warga Australia yang dipidana mati dalam kasus narkoba.

Terpidana mati Myuran Sukumaran dan Andrew Chan merupakan anggota Bali Nine, kelompok penyelundup dan pengedar narkoba skala besar yang ditangkap di Bali. Presiden Joko Widodo menolak permohonan grasi kedua terpidana mati itu.

*(Ant, Vvn/ CN33)*

### 3. News 3

## **Duo Gembong Bali Nine Tetap Dieksekusi, Menlu Australia Kecewa**

4 Maret 2015 8:30 WIB Category: Nasional, SmCetak Dikunjungi: kali A+ / A-



Foto: Istimewa

**SYDNEY, suaramerdeka.com** – Lantaran permohonannya agar duo gembong Bali Nine tidak dieksekusi diabaikan, Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, mengaku kecewa terhadap Pemerintah Indonesia.

Bishop menyebut, kabar tersebut merupakan sebuah berita buruk dan menghancurkan hatinya. “Saya kecewa dengan laporan Andrew dan Myuran akan dipindahkan oleh otoritas Indonesia dalam persiapan eksekusi mereka,” kata Bishop.

Harian The Australian, Rabu (4/3) melansir, eksekusi akan tetap dilakukan dalam waktu dekat. Bahkan, pagi ini Myuran Sukumaran dan Andrew Chan akan dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan menuju ke Pulau Nusakambangan.

Dalam wawancara dengan Fairfax Media, Bishop turut menyebut, Pemerintah Australia tidak diinformasikan mengenai pemindahan mereka ke Nusakambangan. Padahal, Negeri Kanguru telah meminta hal itu sebelumnya kepada otoritas di Indonesia.

“Otoritas Indonesia memang tetap menjalin komunikasi dengan konsuler kami di Bali. Tetapi, mereka belum memberikan informasi resmi mengenai rencana pemindahan Andrew dan Myuran dan hari eksekusi mereka,” ujar Bishop.

Dia pun tetap meminta kepada Pemerintah Indonesia, agar menginformasikan hal itu. Pemerintah Indonesia berjanji akan memberikan notifikasi 72 jam sebelum keduanya dieksekusi.

Jelang detik-detik terakhir eksekusi, Bishop mengaku tidak menyerah. Seolah ingin membuat keajaiban, dia mengatakan tetap terus menghubungi para Menteri di Indonesia, agar eksekusi bisa dibatalkan.

“Dengan adanya fakta bahwa mereka telah menjadi individu yang berubah, jika eksekusi tetap dijalankan, ini sungguh perbuatan keji,” tambah Bishop.

(Vvn / CN26)

#### 4. News 4

### Tak Ada Dasar Hukum, Barter “Bali Nine” Ditolak

6 Maret 2015 4:38 WIB Category: Berita Utama, SmCetak ☐ A+ / A-



SM/Reuters

KELUARGA TERPIDANA: Kapal penyeberangan mengangkut sejumlah pengunjung, termasuk keluarga terpidana hukuman mati Rodrigo Gualarte dan Sergei Atlaoui menuju ke LP Nusakambangan.(30)

JAKARTA – Pemerintah Indonesia memastikan menolak barter dua terpidana mati anggota sindikat "Bali Nine" dengan tiga WNI yang menjadi narapidana di Negeri Kanguru. Pasalnya, tidak ada dasar hukum yang mengatur hal tersebut.

Tawaran barter itu disampaikan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop menjelang eksekusi terhadap dua anggota Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, di Nusakambangan, Cilacap.

"Tidak ada," kata Presiden Joko Widodo ketika ditanya wartawan soal tawaran pertukaran napi itu, setelah menghadiri perayaan capgome di pelataran Vihara Dhanagun, Bogor, Kamis (5/3) sore.

Meski tegas menolak tawaran itu, Presiden menyatakan akan tetap menjaga hubungan baik dengan negara tetangga dengan batasan-batasan yang harus dihormati satu sama lain. "Kedaulatan hukum tetap kedaulatan hukum, kedaulatan politik tetaplah kedaulatan politik," katanya.

Sebagaimana dilansir The Canberra Times, kemarin, permintaan barter tersebut disampaikan Menlu Australia Julie Bishop saat menelepon Menlu RI Retno Marsudi pada Selasa (3/3) malam.



Bishop menawarkan pembebasan tiga WNI yang ditahan di penjara Australia karena terlibat kasus narkoba. Ketiganya adalah Kristito Mandagi, Saud Siregar, dan Ismunandar.

Mereka ditangkap saat hendak menyelundupkan 252,3 kilogram heroin senilai lebih kurang Rp 4 triliun-Rp 6 triliun dari Indonesia ke Australia pada 1998. Kristito divonis seumur hidup tanpa masa pembebasan bersyarat 25 tahun. Dia mengajukan banding dan akhirnya masa pembebasan bersyaratnya dikurangi enam tahun menjadi 19 tahun. Kristito berhak mengajukan pembebasan bersyarat pada Oktober 2017.

Adapun Saud dan Ismunandar divonis 20 tahun penjara dan berhak mengajukan pembebasan bersyarat pada 2018.

#### Etika Diplomatik

Menlu Retno Marsudi menegaskan, tidak ada aturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang tukar-menukar (barter) tahanan. "Tidak ada aturan hukum di Indonesia yang memungkinkan hal tersebut dapat dilakukan."

Retno menyatakan, ia telah menyampaikan sikap pemerintah tersebut kepada Julie Bishop. Chan dan Sukumaran adalah dua dari sembilan anggota sindikat Bali Nine yang terlibat penyelundupan delapan kilogram heroin pada 2005 melalui Bandara Ngurah Rai, Denpasar. Keduanya divonis mati, tujuh lainnya dihukum 20 tahun penjara hingga seumur hidup.

Juru Bicara Kemenlu Arrmanatha Natsir mengatakan, pemerintah memaklumi bahwa tawaran Australia itu suatu yang wajar dilakukan sebuah negara yang ingin melindungi warganya secara maksimal.

Indonesia hanya bisa memenuhi tawaran sesuai aturan hukum, etika diplomatik, dan kedaulatan hukum di negeri ini. "Bila memang tidak ada aturan yang mendasari, ya tidak akan bisa kita penuhi. Ini prinsip," kata dia.

Hal senada dikatakan Menkumham Yasonna Laoly. "Tidak semudah itu. Apalagi pertukaran menyangkut hukuman mati. Apa sekarang ada orang kita yang terkena hukuman mati di Australia? Nggak ada, kan," kata Yasonna di kompleks Istana.

Yasonna menambahkan, Indonesia selalu terbuka untuk bekerja sama dalam bidang hukum dengan Australia, misalnya dalam hal ekstradisi. Namun bila menyangkut hukuman mati, hal tersebut perlu dipikirkan masak-masak.

Guru besar hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan, tawaran pemerintah Australia sangat janggal, khususnya bila dilihat dari sudut pandang hukum internasional.

"Tawaran itu juga cenderung membodohi pemerintah Indonesia. Pertukaran tahanan atau tawanan (exchange of prisoners) hanya dikenal ketika dua negara berperang. Kemudian, masing-masing negara menawan tentara yang tertangkap," ujar Hikmahanto.

Sementara, Indonesia dan Australia jelas tidak dalam situasi perang. Tahanan yang ada juga bukan ditangkap karena situasi perang, melainkan karena melakukan kejahatan.

”Kalaupun yang dimaksud Julie Bishop adalah pemindahan terpidana (transfer of sentenced person), maka antara Indonesia dan Australia belum ada perjanjian itu,” tandasnya.

Jaksa Agung M Prasetyo menegaskan, pihaknya tidak pernah terpikir untuk mengabulkan tawaran barter dari pemerintah Australia. Prasetyo masih merahasiakan jadwal eksekusi mati para terpidana mati narkoba. Menurut rencana, eksekusi akan dilakukan secara serempak di tempat terpisah di Nusakambangan. (F4, K24,H28,J22,di,ant-59)

## 5. News 5

# Dilobi Senator Australia, PBNU Kekeuh Dukung Hukuman Mati Bali Nine

10 Maret 2015 19:50 WIB Category: Nasional, SmCetak Dikunjungi: kali A+ / A-



Foto: Istimewa

**JAKARTA, suaramerdeka.com** - Berbagai cara ditempuh oleh Pemerintah Australia untuk membatalkan eksekusi mati, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Setelah cara diplomasi tak berhasil, Australia berusaha membatalkan eksekusi mati dengan menggunakan perantara tokoh Islam negeri Kangguru.

Anggota Senat Australia, Nick Xenophon, Selasa (10/3) datang ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk meminta dukungan atas keinginan pemerintahnya

agar hukuman mati terhadap duo “Bali Nine” ditunda. “Kami sadar (pemberlakuan, red) hukuman mati ini hak Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu kami tidak meminta dibatalkan, tapi mohon untuk itu ditunda, agar ke depan juga bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat Australia bahwa narkoba membawa bahaya yang sangat besar,” kata Imam Masjid Afghan, Adelaide, Australia, Syech Kafrawi Abdurrahman Hamzah, penterjemah sekaligus pendamping kedatangan Nick Xenophon ke PBNU.

Lebih lanjut Kafrawi mengatakan, pihaknya khawatir jika hukuman mati tetap diberlakukan terhadap duo “Bali Nine” maka yang terjadi adalah permusuhan antara Australia dan Indonesia.

Menjawab keinginan yang disampaikan delegasi Australia, Sekretaris Jenderal PBNU Marsudi Syuhud menegaskan sikap PBNU yang mendukung hukuman mati terhadap pengedar dan bandar narkoba. “Tidak semua hukuman mati kami dukung. Ketika Pemerintah Mesir akan mengeksekusi mati tahanan politik, kami bersurat ke PBB agar bisa menghentikan itu. Tapi kalau narkoba beda, karena narkoba sudah membunuh 50 orang di Indonesia setiap harinya,” tegas Marsudi. (*A Adib/CN38/SM Network*)